

ANALISIS DIMENSI KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2018

Mohammad Jefri Darmawan¹, Tukiman²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail: jeffridarmawan47@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan adalah sebuah upaya yang dilakukan demi menuju suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tujuan pembangunan jangka panjang nasional, salah satunya adalah mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Maka, pembangunan tidak serta merta hanya terpusat, namun juga harus bersifat pembangunan kedaerahan. Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah, bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Fokus analisis didasarkan pada teori dimensi pendekatan perencanaan pembangunan dari Mudrajad Kuncoro (2018:36), yaitu secara regional (spasial) dan sektoral. Teknik analisis data menggunakan tipologi kelas dengan skema pemetaan wilayah pada setiap kuadran. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, antara lain laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, laju pertumbuhan sektoral, dan kontribusi sektoral. Tergolong jenis penelitian *library research*, karena metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: (1) Secara spasial atau kewilayahan, sebagian besar daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, masih tergolong daerah yang relatif tertinggal. (2) Terdapat 6 sektor dengan predikat maju dan tumbuh pesat yang ditempati sebagian besar daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada kuadran 1. (3) Hanya 1 sektor dengan mayoritas daerah di kuadran 2 sebagai sektor yang maju namun tertekan. (4) Terdapat 9 sektor dengan predikat potensial yang ditempati sebagian besar daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada kuadran 3. (5) Hanya 2 sektor dengan mayoritas daerah di kuadran 4 sebagai sektor yang relatif tertinggal.

Kata kunci: *Analisis, Pembangunan, Jawa Timur, Tipologi Klassen.*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah sebuah upaya yang dilakukan demi menuju suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Siagian (2018:4) Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa yang menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan daerah menjadi hal yang banyak mendapat perhatian di era otonomi

daerah. Hal yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah (Iswanto, 2015:42).

Perencanaan wilayah merupakan bagian penting dari sistem manajemen perencanaan yang memiliki peranan sangat besar, perencanaan wilayah memiliki fungsi penting

bagi setiap daerah dalam mencapai tujuannya yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya (Barokah, 2017:1). Dengan harapan, adanya perencanaan wilayah yang dilakukan dengan tepat akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi yang baik pula. Namun keadaan yang ada dilapangan tidak demikian, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia saat ini sangat terasa timpang.

Dilihat dari kondisi kesenjangan wilayah yang ada, sekitar 80% kontribusi wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih berasal dari kawasan Barat khususnya Pulau Jawa dan Sumatra. Diantara provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat kedua provinsi yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi cukup besar. Selama 5 tahun terakhir Jawa Timur juga secara terus menerus mengalami peningkatan pertumbuhan PDRB. Hal ini menjadi suatu indikasi bahwasannya di Provinsi Jawa Timur telah terjadi proses pembangunan apabila dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah mencanangkan visi "Jawa Timur Lebih Berkeadilan". Adil dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata kelola pemerintahan di Jawa Timur dapat mewujudkan kesejahteraan yang merata dan bersifat distributif. Pembangunan dengan pendekatan spasial dan sektoral harus dilakukan seiring masih terdapatnya masalah pada penyusunan rencana pembangunan daerah yang belum optimal secara pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial.

Data peningkatan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir pun tidak serta merta menjadi tolok ukur kesejahteraan yang dirasakan oleh penduduknya. Dari data Badan Pusat Statistika, sebanyak 10,37% dari jumlah penduduk Jawa Timur, atau 4,1 juta warga tergolong miskin. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai rendahnya tingkat kesejahteraan, padahal kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Hal yang sama juga tercermin pada timpangnya PDRB per kapita yang merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Selisih antar daerah yang memiliki jarak secara geografis tidak terlalu jauh ternyata memiliki disparitas pendapatan cukup tinggi, bahkan antara peringkat pendapatan tertinggi dan terendah sangat jauh perbedaannya. Akumulasinya dengan memperhatikan Kota Kediri dan Kabupaten Pamekasan. Kota Kediri yang merupakan Kota dengan PDRB tertinggi (298.795,4 ribu) di tahun 2018, sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Pamekasan (12.476,7 ribu).

Selain itu, penggunaan alat lainnya yang bisa digunakan untuk lebih menguatkan indikasi atau mengukur ketimpangan adalah rasio gini. Rasio gini wilayah kota dan pedesaan di Provinsi Jawa Timur pada kurun waktu tahun 2014 hingga 2018 berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan angka ketimpangannya diatas 0,3. Meskipun demikian, angkanya perlahan turun sejak akhir 2017. Kondisi ini mengindikasikan telah adanya komitmen pemerintah Jawa Timur dalam menurunkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

Selain secara spasial, permasalahan juga dialami wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Timur secara sektoral. Jika berkaca pada salah satu sektor yang disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur periode 2005-2025 untuk menjadi “pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak”, yaitu sektor pertanian, Jawa Timur hingga saat ini masih menemui banyak masalah. Beberapa diantaranya adalah rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian, kurangnya implementasi sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan pertanian (agropolitan/kawasan pertanian terpadu), dan tingginya alih fungsi lahan pertanian.

Penggunaan acuan tahun 2014-2018 didasarkan pada perkembangan 5 tahun terakhir periode kepemimpinan gubernur/kepala daerah sebelumnya (Gubernur Soekarwo). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemetaan secara nyata dengan ukuran perubahan periodik yang konsisten. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadikan bahan evaluasi dan fokus tersendiri bagi tugas pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi persoalan ketimpangan yang ada. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan guna menganalisis dimensi ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018.

KAJIAN PUSTAKA

Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam

semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya (Siagian, 2012:5). Menurut Afifuddin (2012:52) terdapat 7 ide pokok pembangunan, diantaranya adalah, (1) Pembangunan merupakan suatu proses, (2) Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, (3) Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, sedang, dan jangka pendek, (4) Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, (5) Pembangunan mengarah pada modernitas, (6) Modernitas yang ingin dicapai bersifat multidimensional, (7) Pembangunan ditujukan pada usaha untuk pembinaan bangsa dan negara.

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan proses awal dari sebuah pola manajerial. Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Diferensiasi perencanaan pembangunan yaitu berdasarkan proses, dimensi pendekatan dan jangkauan jangka waktu (Kuncoro, 2018:36).

Perencanaan dari segi prosesnya dibedakan menjadi dua, yaitu perencanaan secara *bottom up* dan perencanaan secara *top down*. Sementara itu, perencanaan dari segi pendekatannya dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu perencanaan makro, perencanaan sektoral, perencanaan regional, dan perencanaan mikro. Sedangkan, perencanaan berdasarkan jangkauan jangka waktunya dibedakan menjadi 3, antara lain perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Perencanaan pembangunan harus dilakukan untuk menekan atau mengantisipasi

ketimpangan wilayah. Ketimpangan wilayah timbul karena tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi yang disebabkan karena adanya perbedaan antarwilayah satu dengan lainnya (Ginting, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di suatu daerah akan tetapi tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka akan menyebabkan ketimpangan pembangunan menjadi semakin tinggi. (Bakri, Syafrizal, & Aimon, 2015:6). Maka ketimpangan pembangunan dalam hal ini bisa diartikan sebagai kondisi ketidakseimbangan pertumbuhan perekonomian daerah.

Perencanaan Wilayah

Jhingan (2010:520), mengatakan bahwa perencanaan wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, meningkatkan kesempatan kerja, dan untuk pembangunan yang menyeluruh. Perencanaan wilayah dilakukan dalam rangka mempersiapkan potensi yang dimiliki suatu wilayah, dengan memperkirakan segala kondisi yang akan dilalui dan mempersiapkan upaya serta strategi untuk dapat melakukan pembangunan. Pembangunan yang dalam hal ini diharapkan dapat menciptakan keluaran positif atau perbaikan kondisi di masyarakat yang lebih baik. Hingga dampak nyata yang dihasilkan berhasil mengatasi ketimpangan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan nasional maupun perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan sektoral dan regional (Zai & Pangi, 2017:185). Menurut Rudyanto (2011:3) Untuk Negara Indonesia, yang diperlukan adalah gabungan (kombinasi) antara dua pendekatan, bukan "sektoral" atau

"regional," tetapi keduanya perlu berjalan bersama. Menurut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR (2015:45), pendekatan sektoral dalam perencanaan pembangunan adalah kelompok program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan penunjang pencapaian tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan, perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek tempat kegiatan dilakukan. Keduanya akan menghasilkan perencanaan makro bagi pembangunan suatu wilayah.

Melakukan klasifikasi dimensi pembangunan wilayah dapat dilakukan dengan memetakannya dalam tipologi klassen. Tipologi klassen dapat digunakan untuk memetakan dimensi pembangunan secara spasial maupun sektoral. Hasil pemetaan tipologi klassen akan menghasilkan 4 klasifikasi atau kuadran yang menjadi penggolongan dimensi pembangunan daerah, yaitu sebagai daerah maju dan tumbuh cepat, daerah maju namun tertekan, daerah potensial, dan daerah relatif tertinggal (Kuncoro, 2014).

Lebih lanjut, menurut Kuncoro (2018:152), analisis tipologi daerah disusun berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. Angka yang didapat dibandingkan dengan capaian yang ada di daerah acuan (daerah 1 tingkat di atasnya). Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah.

Analisis tipologi klassen juga bisa digunakan untuk memetakan secara sektor yang menunjang pembangunan, khususnya pada pembangunan perekonomian daerah. Teknik Tipologi Klassen sektoral digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan

struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini didasarkan pada pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) suatu daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel yang digunakan adalah dimensi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Definisi operasional dari ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah perbedaan kondisi pembangunan di Jawa Timur dari tahun 2014 hingga tahun 2018 yang ditinjau secara spasial dan sektoral. Pengamatan dilakukan pada keseluruhan (38) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Ditinjau dari segi sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data PDRB Provinsi Jawa Timur, yang memuat data berupa angka terkait laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, laju pertumbuhan sektoral, dan kontribusi sektoral terhadap PDRB masing-masing daerah kabupaten/kota.

1. Tipologi Klassen Spasial

Pendapatan Perkapita (y) Laju Pertumbuhan Ekonomi (r)	PDRB per kapita di Kabupaten/Kota lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur $y_i < y$	PDRB per kapita di Kabupaten/Kota lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur $y_i > y$
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih besar dari Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur $r_i > r$	Potensial	Maju dan Tumbuh Cepat
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota lebih Kecil dari Laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi $r_i < r$	Relatif Tertinggal	Maju namun tertekan

Kuadran 1, yaitu daerah yang maju dan tumbuh cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Kemudian, kuadran 2, yaitu daerah maju namun tertekan, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah tetapi pendapatan per kapitanya lebih tinggi dibanding rata-rata. Kuadran 3, yaitu daerah yang potensial, adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Terakhir kuadran 4, yaitu daerah relatif tertinggal, adalah daerah yang pertumbuhan ekonomi

maupun pendapatan per kapitanya lebih rendah dibandingkan rata-rata.

2. Tipologi Klassen Sektoral

Kontribusi (y) Pertumbuhan (r)	Kontribusi sektor i terhadap PDRB di Kabupaten/ kota lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur yik < yi	Kontribusi sektor i terhadap PDRB di Kabupaten/k ota lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur yik < yi
Laju pertumbuhan sektor I di Kabupaten/ko ta lebih daripada Provinsi Jawa Timur rik > ri	Potensial	Maju dan Tumbuh Cepat
Laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten/ko ta lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur rik < ri	Relatif Tertinggal	Maju namun Tertekan

Kuadran 1, yaitu daerah yang maju dan tumbuh cepat adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan sektoral dan kontribusi lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Kuadran 2 yaitu daerah maju namun tertekan adalah daerah yang memiliki pertumbuhan sektoral lebih rendah tapi kontribusi sektoral yang dihasilkan lebih tinggi dibanding rata-rata. Kuadran 3, yaitu daerah yang potensial, adalah daerah yang laju pertumbuhan sektoralnya tinggi, namun kontribusi sektoralnya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Kuadran 4 daerah relatif tertinggal adalah

daerah yang memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi sektoralnya lebih rendah dibandingkan rata-rata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Klassen spasial

Kuadran 1 (Kab. Bojonegoro, Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kota Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Pasuruan). Kuadran 2 (Kota Kediri dan Kota Batu). Kuadran 3 (Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi). Kuadran 4 (Kab. Jember, Kab. Pacitan, Kab. Malang, Kab. Pamekasan, Kab. Blitar, Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Tuban, Kab. Tulungagung, Kab. Pasuruan, Kab. Magetan, Kab. Trenggalek, Kab. Ngawi, Kab. Situbondo, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Jombang, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, dan Kab. Sumenep).

2. Tipologi Klassen Sektoral

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan

Kuadran 1 (Kab. Sumenep, Kab. Lamongan, Kab. Pamekasan, Kab. Blitar, Kab. Banyuwangi, Kab. Trenggalek, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Nganjuk, Kab. Bondowoso, Kab. Kediri, Kab. Bangkalan, Kab. Malang, Kota Batu, Kab. Tuban, Kab. Jember, Kab. Pacitan, dan Kab. Sampang. Kuadran 2 (Kab. Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Tulungagung, Kab. Jombang, dan Kab. Bojonegoro). Kuadran 3 (Kab. Gresik, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Pasuruan). Kuadran 4 (Kota Kediri, Kab. Mojokerto, Kota Malang,

Kota Pasuruan, Kota Madiun, dan Kota Blitar).

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kuadran 1 (Kab. Bojonegoro). Kuadran 2 (Kab. Sampang, Kab. Sumenep, dan Kab. Bangkalan). Kuadran 3 (Kab. Ngawi, Kab. Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Banyuwangi, Kab. Lumajang, Kab. Pamekasan, Kab. Nganjuk, Kab. Jember, Kab. Pacitan, dan Kab. Gresik). Kuadran 4 (Kab. Bondowoso, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kab. Trenggalek, Kota Surabaya, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Pasuruan, Kota Pasuruan, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Magetan, Kab. Tulungagung, Kota Batu, Kab. Situbondo, dan Kab. Ponorogo).

Sektor Industri

Kuadran 1 (Kab. Malang, Kab. Mojokerto, dan Kab. Pasuruan). Kuadran 2 (Kota Kediri, Kab. Gresik, dan Kab. Sidoarjo). Kuadran 3 (Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, Kab. Pamekasan, Kab. Trenggalek, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kota Batu, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Magetan, Kab. Sumenep, Kab. Ponorogo, Kab. Bojonegoro, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Kediri, dan Kab. Bondowoso). Kuadran 4 (Kab. Pacitan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jember, Kab. Sampang, Kab. Ngawi, Kab. Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kab. Jombang, Kab. Tuban, Kota Pasuruan, dan Kota Malang).

Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Kuadran 1 (Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Gresik). Kuadran 2 (Kab. Sidoarjo dan Kota Surabaya). Kuadran 3 (Kab. Jember, Kab. Lamongan, Kab. Madiun, Kota Madiun, Kab. Banyuwangi, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Ngawi, Kota Batu, Kab. Bangkalan, Kab. Magetan, Kab. Bondowoso, Kab. Ponorogo, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kab. Pamekasan, Kab. Nganjuk, Kab. Sumenep, Kab. Pacitan, Kab. Situbondo, Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Sampang, Kab. Jombang, Kab. Trenggalek, Kab. Lumajang, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Pasuruan. Kuadran 4 tidak ada daerah yang dinyatakan relatif tertinggal.

2. Sektor Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah

Kuadran 1 (Kab. Lamongan, Kab. Ngawi, Kab. Malang, Kota Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kota Batu, Kab. Probolinggo, dan Kota Surabaya). Kuadran 2 (Kab. Magetan, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kab. Situbondo, Kab. Jombang, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Kuadran 3 (Kab. Jember, Kab. Kediri, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Gresik, Kab. Bondowoso, Kab. Blitar, Kab. Pasuruan, dan Kab. Tulungagung). Kuadran 4 (Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, Kab. Banyuwangi, Kab. Pamekasan, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan, Kab. Tuban, Kab. Sumenep, Kota Kediri, dan Kab. Lumajang).

4. Sektor Konstruksi

Kuadran 1 (Kota Batu, Kab. Madiun, Kab. Banyuwangi, Kab. Nganjuk, Kab.

Bangkalan, Kota Malang, Kab. Pamekasan, Kab. Jombang, Kab. Lamongan, Kab. Malang, dan Kab. Pacitan). Kuadran 2 (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Tuban). Kuadran 3 (Kab. Gresik, Kab. Ngawi, Kab. Jember, Kab. Probolinggo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Bojonegoro, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kab. Trenggalek, Kab. Sidoarjo, Kab. Sampang, Kab. Bondowos, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, dan Kab. Blitar). Kuadran 4 (Kota Blitar, Kab. 5. Tulungagung, Kab. Kediri, Kota Madiun, Kab. Situbondo, dan Kota Kediri).

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kuadran 1 (Kab. Nganjuk, Kab. Pamekasan, Kota Batu, Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Kota Malang. Kuadran 2 (Kab. Malang, Kota Madiun, dan Kota Pasuruan). Kuadran 3 (Kab. Banyuwangi, Kab. Ponorogo, Kab. Sampang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Gresik, Kab. Bojonegoro, Kab. Jember, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kab. Situbondo, Kab. Ngawi, Kab. Bondowoso, Kab. Pacitan, Kab. 6. Bangkalan, Kab. Blitar, Kab. Probolinggo, 7. Kab. Pasuruan, Kota Kediri, Kab. Tuban, dan Kab. Sidoarjo). Kuadran 4 (Kab. Mojokerto dan Kab. Trenggalek).

Sektor Transportasi dan Pergudangan

Kuadran 1 (Kota Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Probolinggo). Kuadran 2 (Kota Pasuruan dan Kab. Sidoarjo). Kuadran 3 (Kab. Bojonegoro, Kab. Pacitan, Kab. Tuban, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Nganjuk, Kab. Sumenep, Kab. Lamongan,

Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung, Kab. Pamekasan, Kab. Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Sampang, Kota Batu, Kab. Situbondo, Kab. Banyuwangi, Kab. Kediri, Kota Kediri, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Gresik, dan Kab. Bondowoso. Kuadran 4 (Kab. Jombang, Kab. Bangkalan, dan Kota Mojokerto).

Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Kuadran 1 (Kota Batu dan Kota Surabaya). Kuadran 2, Kota Mojokerto. Kuadran 3 (Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Bojonegoro, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kota Pasuruan, Kab. Gresik, Kab. Tuban, Kota Probolinggo, Kab. Situbondo, Kab. Ngawi, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, Kab. Magetan, Kab. Sidoarjo, Kab. Sampang, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, dan Kota Blitar. Kuadran 4 (Kab. Tulungagung, Kab. Nganjuk, Kab. Bondowoso, Kab. Ponorogo, Kota Malang, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Probolinggo, Kab. Trenggalek, Kab. Pacitan, Kab. Malang, Kota Kediri, dan Kab. Kediri).

Sektor Informasi dan Komunikasi

Kuadran 1 (Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Pamekasan, Kab. Blitar, Kab. Magetan, Kab. Bondowoso, Kab. Trenggalek, Kab. Jombang, Kota Probolinggo, Kab. Lamongan, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, Kab. Mojokerto, Kab. Situbondo, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun). Kuadran 2 (Kota Batu dan Kota Blitar). Kuadran 3 (Kab. Sumenep, Kab. Sampang, Kab.

Lumajang, Kab. Tuban, Kab. Banyuwangi, Kota Malang, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. Probolinggo, Kab. Nganjuk, dan Kab. Malang). Kuadran 4 (Kab. Pasuruan dan Kota Kediri).

Jasa Keuangan dan Asuransi

Kuadran 1 (Kab. Situbondo, Kab. Ponorogo, Kota Surabaya, Kab. Bondowoso, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, dan Kota Blitar). Kuadran 2 (Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Batu). Kuadran 3 (Kab. Sumenep, Kab. Bojonegoro, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Sampang, Kab. Magetan, Kab. Banyuwangi, Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Gresik, Kab. Nganjuk, Kab. Pamekasan, Kab. Lumajang, Kab. Jombang, Kab. Probolinggo, Kab. Sidoarjo, 8. dan Kab. Pacitan. Kuadran 4 (Kab. Kediri, 9. Kab. Jember, Kab. Malang, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Bangkalan, Kab. Pasuruan, dan Kab. Blitar).

Sektor Real Estat

Kuadran 1 (Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Pamekasan, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kota Batu, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Blitar). Kuadran 2 (Kab. Probolinggo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Pasuruan. Kuadran 3 (Kab. Bojonegoro, Kab. Situbondo, Kab. Tuban, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab. Sumenep, Kab. Lumajang, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Sidoarjo, Kab. Magetan, dan Kab. Sampang. Kuadran 4 (Kota Kediri, Kab. Pasuruan, Kab. Bondowoso, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, dan Kab. Mojokerto).

Sektor Jasa Perusahaan

Kuadran 1, tidak ada daerah yang tergolong maju dan tumbuh cepat. Kuadran 2 hanya Kota Surabaya. Kuadran 3 (Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, Kab. Tuban, Kota Malang, Kab. Malang, Kab. Pamekasan, Kab. Trenggalek, Kab. Situbondo, Kab. Sumenep, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Jember, Kota Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Lumajang, Kab. Banyuwangi, Kab. Pasuruan, dan Kab. Lamongan). Kuadran 4 (Kab. Pacitan, Kab. Mojokerto, Kota Probolinggo, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Sidoarjo, Kab. Probolinggo, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kab. Bondowoso, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan, Kab. Blitar, dan Kota Blitar).

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kuadran 1 (Kab. Jember, Kab. Sampang, Kab. Bangkalan, Kab. Probolinggo, Kota Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Bondowoso, Kab. Nganjuk, Kab. Lumajang, Kab. Lamongan, Kota Batu, Kab. Tulungagung, Kab. Bojonegoro, Kab. Pacitan, Kab. Nganjuk, Kab. Ponorogo, dan Kota Probolinggo). Kuadran 2 (Kab. Sumenep, Kab. Kediri, Kab. Mojokerto, Kab. Blitar, Kab. Situbondo, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kab. Ngawi, Kab. Madiun, Kab. Jombang, Kab. Magetan, dan Kota Blitar). Kuadran 3 (Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi, Kab. Tuban, dan Kab. Pasuruan). Kuadran 4 (Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kota Kediri, Kab. Malang, dan Kota Malang).

Sektor Jasa Pendidikan

Kuadran 1 (Kota Malang, Kab. Sampang, Kab. Tulungagung, Kab.

Bondowoso, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, Kab. Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Jember, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kab. Pacitan, Kota Batu, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Trenggalek, Kab. Pamekasan, dan Kab. Jombang). Kuadran 2 (Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, dan Kota Madiun). Kuadran 3 (Kab. Sumenep, Kab. Gresik, Kab. Lamongan, Kota Kediri, Kab. Tuban, Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kota Surabaya, Kab. Mojokerto, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Sidoarjo). Kuadran 4 hanya ditempati Kab. Pasuruan.

Sektor Jasa Kesehatan

Kuadran 1 (Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Blitar, Kab. Lumajang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kab. Tulungagung, dan Kota Malang). Kuadran 2 (Kab. Pamekasan, Kota Surabaya, Kab. Jember, Kab. Pacitan, Kab. Bondowoso, Kab. Kediri, Kab. Madiun, Kota Mojokerto, Kab. Situbondo, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Pasuruan, dan Kab. Ponorogo). Kuadran 3 (Kab. Banyuwangi, Kab. Tuban, Kab. Sumenep, Kota Kediri, Kab. Mojokerto, Kab. Gresik, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, dan Kab. Nganjuk. Kuadran 4 (Kab. Bangkalan, Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Sampang, dan Kab. Bojonegoro).

Sektor Jasa Lainnya

Kuadran 1 (Kota Batu, Kab. Ngawi, Kab. Lumajang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Jombang, Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Malang, Kab. Bondowoso, dan Kab. Ponorogo).

Kuadran 2 (Kota Mojokerto, Kab. Probolinggo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan. Kuadran 3 (Kab. Banyuwangi, Kab. Tuban, Kab. Sumenep, Kab. Gresik, Kab. Blitar, Kab. Jember, dan Kab. Tulungagung). Kuadran 4 (Kota Kediri, Kab. Bojonegoro, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, dan Kab. Bangkalan).

Penyajian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat dilihat bahwasannya dari 17 jenis lapangan usaha yang dikelompokkan, sebagian besar sektor tergolong potensial untuk dikembangkan. Hal tersebut merupakan gambaran dari banyaknya daerah-daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang menempati kuadran 3 di 9 sektor yang ada.

Meskipun, 9 sektor menjadi sektor yang banyak ditempati daerah-daerah potensial, namun predikat daerah maju dan tumbuh pesat (kuadran 1) juga tidak kecil persentasenya. Terdapat 6 sektor yang sebagian besar daerahnya menempati kuadran 1. Hal ini cukup baik, artinya relatif hanya ada 3 sektor yang mayoritas daerah tidak memiliki kelajuan sektoral yang cukup baik (di kuadran 2 dan kuadran 4) jika dibandingkan dengan angka rata-rata provinsi.

Berbeda dengan analisis sektoral, analisis secara spasial ternyata menunjukkan hasil yang berbeda. Mayoritas daerah-daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur tidak lagi menumpuk pada kuadran 3. Hitung-hitungan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, menggambarkan tingginya ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar daerah justru menempati kuadran 4, atau yang

dikategorikan sebagai daerah yang relatif tertinggal.

Pada dimensi sektoral, hasil yang didapat berbeda dengan dugaan penulis yang menduga secara sektoral mayoritas daerah pada sebagian besar sektor tergolong sebagai daerah yang relatif tertinggal. Hal ini mengindikasikan telah terjadi proses pembangunan yang cukup baik dengan tingginya laju pertumbuhan sektoral yang ada. Sedangkan pada analisis spasial, dugaan peneliti sesuai dan memang terjadi disparitas pembangunan secara dimensi spasial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembangunan antar wilayah dari klasifikasi tipologi klassen pada Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2018, didapati masih adanya ketimpangan antar wilayah, baik secara spasial maupun sektoral. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan posisi daerah pada setiap kuadran masing-masing tipologi klassen. Hasil lebih lanjut dari kesimpulan penelitian, sebagai berikut :

1. Secara spasial, mayoritas daerah (22 kota/kabupaten) di Provinsi Jawa Timur menempati kuadran 4 sebagai daerah yang relatif tertinggal;
2. Secara sektoral, ditinjau dari 17 sektor pada PDRB menurut lapangan usaha, mayoritas daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada sebagian besar sektor termasuk daerah yang potensial;
3. Terdapat 6 sektor yang banyak dihuni daerah-daerah pada kuadran 1 atau sebagai daerah yang maju dan tumbuh pesat;
4. Terdapat 1 sektor yang banyak dihuni daerah-daerah pada kuadran 2 atau

sebagai daerah yang maju namun tertekan;

5. Terdapat 9 sektor yang banyak dihuni daerah-daerah pada kuadran 3 atau sebagai daerah potensial;
6. Terdapat 2 sektor yang banyak dihuni daerah-daerah pada kuadran 4 atau sebagai daerah yang relatif tertinggal.

Saran

1. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah hendaknya juga diikuti oleh pendapatan per kapita masyarakatnya. Pembangunan merata dan pemasaran produk-produk lokal yang menjadi sumber pendapatan masyarakat di daerah sudah selayaknya dikedepankan agar mendukung perekonomian, kesejahteraan, dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
2. Sektor-sektor yang potensial harus menjadi prioritas pembangunan, dukungan infrastruktur dan kemudahan perizinan perlu diberikan agar lebih menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Terdapat 35% sektor sudah tergolong maju dan tumbuh pesat, maka capaian ini harus dipertahankan dengan upaya stabilisasi pertumbuhan dan optimalisasi sektor tersebut bagi PDRB masing-masing daerah.
4. Sektor jasa kesehatan menjadi kontributor yang cukup dominan di banyak daerah, namun tidak cukup baik laju pertumbuhannya. Upaya peningkatan dan perbaikan kualitas penyedia jasa layanan kesehatan harus ditingkatkan lagi.

7. Tendensi pembangunan lebih baik diarahkan kepada sektor yang berkaitan dengan perkembangan zaman. Industrialisasi dan mobilitas masyarakat dalam keseharian ternyata menjadi suatu hal yang memerlukan penyediaan jasa. Maka sektor-sektor yang mayoritas daerah menempati kuadran 3, tidak salah jika harus dioptimalkan perannya dengan membuka seluas-luasnya peluang usaha pada sektor tersebut.
8. Memfokuskan lini pertambangan dan penggalian di daerah yang memiliki potensi alam tersebut. Serta, membuka jaringan kerjasama dengan sektor swasta guna memperoleh manfaat dari bahan daur ulang, keuntungan dari pengelolaan, dan lapangan kerja masyarakat dari adanya pusat produksi pengolahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2012). *Pengantar Administrasi Pembangunan* (2nd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2015). *Pemahaman Rencana Tata Ruang sebagai Basis Penyusunan Rencana Terpadu* (1). Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019*. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2019*. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2019*. Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*. Surabaya.
- Bakri, Syafrizal, & Aimon, H. (2015). Analisis Ketimpangan Pembangunan antar Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dan Kebijakan Penanggulannya. *Kajian Ekonomi*, 4(7).
- Barokah, N. (2017). *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Kajian Dimensi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Cilacap)*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar wilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013. *Kajian*, 20 (1), 45–58.
- Iswanto, D. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/ Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur. *Signifikan*, 4(1), 41–66.
- Jhingan, M. . (2010). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. (D. Guritno, Ed.) (13th ed.). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. (S. Saat & W. Hardani, Eds.) (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014 - 2019.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur periode 2005-2025.

Rudiyanto, A. (2011). *Urgensi Kerja Sama Pembangunan Sektoral dan Daerah Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Bappenas Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Bappenas.

Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan* (8th ed.). Jakarta: Bumi

Aksara.

Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zai, V. R. C., & Pangi. (2017). Analisis Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Sektoral dan Regional di Kabupaten Bogor. In *2614-7211* (pp. 185–194). Cibinong: Badan Informasi Geospasial. <https://doi.org/2614-7211>